

## ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG (KAMPUNG ISANO MBIAS)

Abdul Hakim Arif<sup>1</sup>, Neris Nurul Khotimah<sup>2</sup>, Wella Shintya Jenie Latupeirissa<sup>3</sup>, Nofayana Kadmaerubun<sup>4</sup>, Aulia Tri Annisa<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [abdulhakimarif.papua@gmail.com](mailto:abdulhakimarif.papua@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [neriskhotimah1@gmail.com](mailto:neriskhotimah1@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [wella.latupeirissa@gmail.com](mailto:wella.latupeirissa@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [nofayanakadmaerubun@gmail.com](mailto:nofayanakadmaerubun@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, [auliaatrii22@gmail.com](mailto:auliaatrii22@gmail.com)

### Riwayat Artikel:

Received: 2/10/2025

Revised: 16/10/2025

Accepted: 30/10/2025

Published: 30/10/2025

### Corresponding Author:

Nama: Abdul Hakim Arif

Email: [abdulhakimarif.papua@gmail.com](mailto:abdulhakimarif.papua@gmail.com)

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



### Abstract:

*This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the management of village funds in Isano Mbias Village, with a particular focus on the principle of accountability. The research employed a descriptive qualitative case study approach, with data collected through interviews with village residents and officials. The findings indicate that accountability has been implemented through transparent fund reporting mechanisms, including village meetings and visual displays such as posters. The community is actively involved in monitoring and evaluating fund use. The principle of transparency is also applied, although challenges remain due to limited public understanding of fund management procedures. Overall, the implementation of GCG in Isano Mbias Village has had a positive impact on community trust, the effectiveness of fund use, and development efficiency.*

**Keywords:** *Accountability, Good Corporate Governance, Isano Mbias, Transparency, Village Fund.*

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana kampung di kampung Isano Mbias, khususnya prinsip akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan dana secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah kampung maupun media visual seperti poster. Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Penerapan prinsip transparansi juga berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengelolaan dana. Secara

umum, penerapan GCG di kampung Isano Mbias berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, efektivitas penggunaan dana, dan efisiensi pembangunan.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Dana Kampung, *Good Corporate Governance*, Isano Mbias, Transparansi.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Kampung merupakan salah satu aspek krusial dalam Pembangunan dan pemerintah desa yang berkelanjutan. Dana kampung yang bersumber dari alokasi pemerintah pusat, provinsi, maupun sumber lain, memiliki peranan strategi dalam mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan Masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Dana menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dalam konteks tata Kelola, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi paradigma penting yang dapat diadaptasi oleh pemerintah desa atau kampung. Secara umum mekanisme, proses, dan hubungan yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam lingkup pemerintahan desa, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness menjadi landasan utama dalam memastikan pengelolaan dana kampung yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Fokus utama pada akuntabilitas berarti seluruh proses pengelolaan dana kampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait, baik dari segi pelaporan penggunaan dana maupun hasil yang diperoleh. Akuntabilitas ini menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana serta upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat kampung.

Kampung Isano Mbias sebagai objek studi merupakan salah satu kampung yang menerima dana kampung dengan besaran signifikan dan memiliki program pembangunan yang membutuhkan tata kelola yang matang. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam penerapan GCG, terutama dalam aspek akuntabilitas yang berdampak pada efektivitas penggunaan dana. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Isano Mbias sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran sekaligus rekomendasi perbaikan.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan seperti, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Kampung di Isano Mbias? Sejauh mana akuntabilitas dijalankan dalam proses Pengelolaan dana kampung tersebut? Faktor apa yang mempengaruhi Tingkat akuntabilitas dalam Pengelolaan dana kampung Isano Mbias? Apa dampak penerapan

*Good Corporate Governance* terhadap efektivitas dan transparansi Pengelolaan dana kampung?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Kampung Isano Mbias, mengidentifikasi dan menilai pelaksanaan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam Pengelolaan dana kampung, menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas akuntabilitas dalam Pengelolaan dana kampung, dan menilai dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas Pengelolaan dana kampung khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Kampung Isano Mbias, khususnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung.

Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kampung, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kampung Isano Mbias merupakan salah satu kampung yang terdapat di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Prinsip akuntabilitas sendiri juga telah diterapkan di Kampung Isano Mbias. Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala kampung dan Bendahara Kampung sebagai aparat kampung. Dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dana di kampung Isano Mbias harus segera dipublikasikan minimal 10 hari setelah kegiatan selesai. Mekanisme pertanggungjawaban dana kampung Isano Mbias sendiri dilakukan dengan cara membuat laporan ke masyarakat dalam bentuk visual (poster) yang ditempel di depan kantor yang berisi realisasi dana dari kegiatan yang sudah dilakukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung adalah tanggung jawab mutlak yang harus dijalankan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis. Jika tidak berjalan sesuai petunjuk, akan ada temuan masalah.

Untuk detail realisasi dana, aparat kampung setempat menyampaikan ke perwakilan Musyawarah Kampung (MUSKAM) sebagai perwakilan masyarakat. Tentu saja ini dilakukan agar masyarakat mengetahui detail dana yang digunakan pemerintah setempat. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dari dana desa. Masyarakat akan ikut mengawasi dan akan melaporkan ke Pihak MUSKAM jika ada penyalahgunaan dana kampung. Selain menggunakan dana untuk pembangunan, pemerintah setempat juga akan mengadakan proses evaluasi yang dijalankan sekali setiap bulan, dengan melibatkan kepala kampung, Aparat kampung, dan perwakilan MUSKAM. Prinsip Transparansi yang diterapkan oleh kampung Isano Mbias dengan cara membahas setiap dana yang diterima bersama masyarakat dalam forum musyawarah kampung. Aparat kampung akan menjelaskan detail anggaran dan dimusyawarahkan agar pembangunan kampung dapat terlaksana. Prinsip transparansi yang diterapkan oleh Aparat Kampung perlu perbaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan pihak Aparat juga terbuka terhadap pertanyaan dari masyarakat.

Mekanisme pengelolaan dana kampung sendiri dimulai dari dana yang diberikan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK). Pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana bersama masyarakat melalui sistem Padat Karya Tunai (PKT). Hasil pelaksanaan diverifikasi oleh sekretaris dan dilaporkan secara keseluruhan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kampung umumnya adalah kepala kampung dan pelaksananya ada sekretaris sebagai verifikator yang disampaikan

tim pelaksana. Kendala yang dialami oleh aparat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan dana ada pada beberapa masyarakat yang kurang paham dan tidak taat aturan. Beberapa masyarakat meminta tambahan material dan menganggap bahwa dana kampung sangatlah besar.

Penerapan akuntabilitas di kampung Isano Mbias sendiri dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Dengan akuntabilitas, masyarakat menjadi percaya akan realisasi yang dilakukan oleh Aparat. Selain itu, akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana karena dana yang dibelanjakan sesuai dengan RAPBK dan lengkap dengan bukti transaksi. Dengan adanya musyawarah dengan masyarakat setempat juga membuat dana kampung semakin efisien digunakan karena masyarakat tahu pembangunan dan kegiatan apa yang dibutuhkan kampung. Jika penerapan akuntabilitas berjalan dengan lancar, pelaporan pertanggungjawaban pun lancar dan pemeriksaan aman. Masyarakat setempat pun merasakan manfaat dari dana kampung sebagai hasil dari penerapan akuntabilitas yang baik.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance dengan prinsip akuntabilitas di kampung Isano Mbias berjalan dengan baik. Anggaran yang digunakan dapat diketahui oleh masyarakat dan bahkan melibatkan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap pengelolaan dana kampung yang dilakukan oleh Aparat kampung. Aparat setempat juga harus bisa melaporkan penggunaan dana kampung dengan menyediakan bukti transaksi dan dokumen yang lengkap.

Banyak dampak positif yang dirasakan dengan adanya penerapan akuntabilitas pada kampung Isano Mbias. Mulai dari meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kampung, masyarakat yang merasakan manfaat dari realisasi dana kampung, hingga penggunaan dana yang efektif dan efisien karena adanya musyawarah yang dilakukan dengan pihak aparat dan masyarakat sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eni, D. S. 2020. Determinan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 23(1): 99-111
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 31 Desember 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Sanarta, Krisna. 2024. *Mengenal Manfaat Good Corporate Governance Bagi perusahaan*, <https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>
- Syofyan, Efrizal. 2021. *Good Corporate Governance*. Malang : Unisma Press